



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 385 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 536 TAHUN 2023
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian kebutuhan regulasi di Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 536 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 130);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Rancangan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 60);
8. Keputusan Bupati Bantul Nomor 536 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 536 TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Bantul Nomor 536 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2024 pada Lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Juli 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 385 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 536
TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI TAHUN 2024

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2024

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
1	Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul	Materi yang akan diatur meliputi: a. pelaku pengadaan; b. perencanaan pengadaan barang/jasa; c. persiapan pengadaan barang/jasa; d. pelaksanaan pengadaan barang/jasa; e. UKPBJ; f. sumber daya manusia pengadaan; dan g. Pelayanan hukum.	Seluruh Perangkat Daerah	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
2	Dewan Kebudayaan	Ruang Lingkup, tugas, hak dan kewajiban DKB, kepengurusan, aturan peralihan	Bappeda, Dispar, BPKPAD, Bagian Hukum, Bagian Organisasi	SE Gubernur DIY Nomor 3/SE/III/2017
3	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025	Materi yang akan diatur meliputi: a. Ketentuan umum b. Dasar hukum penyusunan RKPD c. RKPD sebagai pedoman dan landasan penyusunan untuk penyusunan dokumen dan kebijakan d. Sistematika RKPD	Seluruh Perangkat Daerah	a. UU Nomor 17 Tahun 2003 b. UU Nomor 25 Tahun 2004 c. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 d. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005
4	Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025	Materi yang akan diatur meliputi: a. Ketentuan umum b. Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah c. Sistematika Renja Perangkat Daerah d. Daftar Perangkat Daerah yang menyusun Renja Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	a. UU Nomor 17 Tahun 2003 b. UU Nomor 25 Tahun 2004 c. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 d. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
5	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024	Materi yang akan diatur meliputi: a. Ketentuan umum b. Dasar Hukum penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 c. RKPD sebagai pedoman dan landasan penyusunan untuk penyusunan dokumen dan kebijakan d. Sistematika perubahan RKPD	Seluruh Perangkat Daerah	a. UU Nomor 17 Tahun 2003 b. UU Nomor 25 Tahun 2004 c. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 d. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010
6	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024	Materi yang akan diatur meliputi: a. Ketentuan umum b. Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah c. Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah d. Daftar Perangkat Daerah yang menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	a. UU Nomor 17 Tahun 2003 b. UU Nomor 25 Tahun 2004 c. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 d. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010
7	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	DPUPKP, Dispertaru	a. UU Nomor 1 Tahun 2011 b. Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2014

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
8	Manajemen Pelatihan Tenaga Kerja	Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja	Disnakertrans, DKPP, DKP, DKUKMP, DPUPKP, Dinas Pariwisata, Dikpora, Disbud, BAPPEDA	a. UU Nomor 13 Tahun 2003 b. PP Nomor 31 Tahun 2006 c. PP Nomor 33 Tahun 2013 d. Permenaker Nomor 11 Tahun 2013 e. Permenaker Nomor 8 Tahun 2014 f. Permenaker Nomor 34 Tahun 2016
9	Tata Kelola Sistem Informasi Desa	- melaksanakan ketentuan Pasal 86 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Pedoman Sistem Informasi Desa untuk mewujudkan data yang terintegrasi serta mendukung program Bantul Smart City dan Smart Village - Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa Kabupaten Bantul	Diskominfo, BAPPEDA dan Kalurahan	Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
10	Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul	Pedoman teknis dalam penilaian evaluasi kinerja perangkat daerah	Seluruh Perangkat Daerah	a. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 b. Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
11	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah	Perubahan sebagian pasal	Seluruh Perangkat Daerah	-
12	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Surat Keterangan Penelitian, Kuliah Kerja Nyata, dan Praktik Kerja Lapangan	Pedoman pelaksanaan KKN di Kabupaten Bantul	BAPPEDA	UU Nomor 12 Tahun 2012
13	Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	Perubahan materi muatan terkait perubahan pemasangan alat kampanye	Bag. Hukum, Satpol PP	UU No. 1 Tahun 2015
14	Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 139 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bantul Tahun 2021-2030			

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
15	Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis	Acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan untuk restorasi Gumuk Pasir Parangtritis	DKPP, DKP, DKUKMP, Dishub, DPUPKP, Dispar, DLH, Disbud, Diskominfo, Satpol PP, Kesbangpol, BPBD, Bappeda, Bag Organisasi Setda, Kapanewon Kretek, DLHK DIY, Panitikismo, PGSP- BIG	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022
16	Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta di Kabupaten Bantul	Acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan dalam Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi di Kabupaten Bantul	DPTR, Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan, DPUPKP, DKUKMPP, Dinas Pariwisata, DPMPTSP, Bappeda, BPKPAD, Dinas Kebudayaan, DLH, BPBD, Dinsos, Dinkes, Badan Kesbangpol, Satpol PP, Disdikpora, DPMKal, Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 b. Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi
17	Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Bantul	Pedoman pemberian BLT- DB H CHT	Dinas Sosial	Permenkeu Nomor 215/PMK.07/2021

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
18	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Boga Sehat	Materi yang akan diatur meliputi : a. Dasar hukum di bagian mengingat diupdate sesuai dengan aturan yang terbaru; b. Ketentuan umum; c. Kriteria penerima layanan; d. Pelaksanaan Program Boga Sehat.	Bappeda Dinsos DPMKal Kapanewon DP3AP2KB Dinkes	-
19	Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan BLUD	Inspektorat Daerah, BAPPEDA, BPKPAD, Dinas Kesehatan, Bagian PPSDA Setda. Kabupaten Bantul, RSUD Panembahan Senopati, RSUD Saras Adyatma, Puskesmas	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018
20	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD seperti pelaksanaan anggaran, akuntansi, silpa, penghapusan piutang, pinjaman jangka pendek	Inspektorat Daerah, BAPPEDA, BPKPAD, Dinas Kesehatan, Bagian PPSDA Setda. Kabupaten Bantul, RSUD Panembahan Senopati, RSUD Saras Adyatma, Puskesmas	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
21	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari	Rincian tugas, wewenang, fungsi dan tata kerja organisasi serta insentif dan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Projotamansari	BAPPEDA, Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul, Bagian PPSDA Setda. Kabupaten Bantul, Perumda Air Minum Tirta Projotamansari	a. Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 b. Perda Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020
22	Pedoman Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari	Rincian penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari	BPKPAD, Bagian PPSDA, Perumdam Tirta Projotamansari	a. Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 b. Perda Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020
23	Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah	Pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD	Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian PPSDA	a. PP Nomor 54 Tahun 2017 b. Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 d. Perda Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2019 e. Perda Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019 f. Perda Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
24	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul	<p>Materi yang diatur meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketentuan umum b. Akses informasi dan dokumentasi publik c. Hak dan kewajiban d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi e. Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi f. Kelengkapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi g. Klasifikasi Informasi Publik h. Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi i. Pembinaan dan Pengendalian Penataan Layanan Informasi dan Dokumentasi j. Keberatan dan Fasilitasi Sengketa Informasi k. Forum Koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 	Seluruh Perangkat Daerah	

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
25	Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Fiber Optik Bersama	Materi yang diatur meliputi: a. Penyelenggaraan jaringan FO b. Rekomendasi jaringan FO bersama c. Kerjasama penyelenggaraan jaringan FO bersama d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian	DPUPKP, DPMPTSP, Satpol PP, Dispertaru, BPKPAD, Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	
26	Masterplan Smart City	Pengesahan dokumen masterplan smart city Kabupaten Bantul	Seluruh Perangkat Daerah	
27	Implementasi Sistem Aplikasi E-Moneter	Penerapan sistem aplikasi E-Moneter	Bagian Hukum, Dinas Kominfo	Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2022
28	Rencana Aksi Daerah Penanggulangan <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndromedi</i> Kabupaten Bantul Tahun 2024-2027			
29	Rencana Aksi Daerah Pemeliharaan dan Penanggulangan Malaria			
30	Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029			

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
31	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2024-2029	rencana strategis UPTD Labkesda dengan penerapan BLUD	Dinas Kesehatan, BPKPAD, Bagian PPSDA Setda. Kabupaten Bantul, Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018
32	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Kabupaten Bantul	SPM UPTD Labkesda dengan penerapan BLUD	Dinas Kesehatan, BPKPAD, Bagian PPSDA Setda. Kabupaten Bantul, Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018
33	Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Kabupaten Bantul	pola tata kelola UPTD Labkesda dengan penerapan BLUD	Dinas Kesehatan, BPKPAD, Bagian PPSDA Setda. Kabupaten Bantul, Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018
34	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok	Petunjuk Pelaksanaan dan delegasi Satuan Tugas Pemantauan Kawasan Tanpa Rokok	Seluruh OPD	Perda Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2022
35	Tarif Layanan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penelitian Pada Badan Layanan Umum Daerah	tarif layanan BLUD	Dinas Kesehatan, RSPS, RSSA, Puskesmas	

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
36	Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah	Penganggaran, Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah	BPKPAD, Dinas Kesehatan, RSUD, Dikpora	a. PP Nomor 12 Tahun 2019 b. Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022
37	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Mengubah mengenai dokumen kelengkapan surat pertanggungjawaban	Inspektorat Daerah, BPKPAD, Bagian PBJ Setda Kabupaten Bantul, Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	
38	Pedoman Pembayaran Gaji Aparat Sipil Negara Melalui Aplikasi SIM Gaji di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul	jenis, pembayaran, syarat pengajuan dan pengambilan gaji	BPKPAD, BKPSDM, Inspektorat Daerah, Bagian hukum, Bagian Organisasi	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
39	Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah	Pedoman pelaksanaan keuangan daerah	Bagian Hukum, BPKPAD	a. PP Nomor 12 Tahun 2019; b. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
40	Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah	Transaksi Non RKUD yang dilakukan oleh SKPD, UPTD dan BLUD	BPKPAD, Bagian Hukum	-
41	Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah	Tata cara pemungutan retribusi, subjek, objek retribusi	BPKPAD, Dikpora, Dinas Pariwisata, DKPP, Dinas perhubungan, DKP, DPUPKP, DPMPTSP	

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
42	Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	Tata cara pemungutan pajak, subjek, objek pajak	BKPAD, DPMPTSP	
43	Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024			
44	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga			
45	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024			
46	Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah			
47	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	penyesuaian kebutuhan anggaran	BKPAD	

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
48	Standardisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025	Batas harga tertinggi pengadaan barang dan jasa	BKPAD, DPUPKP,	
49	Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	Penyesuaian mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021	Inspektorat Daerah, BPKPAD, Bagian PBJ Setda Kabupaten Bantul, Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	a. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 b. Perpres Nomor 12 Tahun 2021
50	Manajemen Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	Penyesuaian dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dan Perbup Bantul Nomor 55 Tahun 2023	BKPSDM, Dinas Kesehatan, Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	a. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 b. b. Perbup Bantul Nomor 55 Tahun 2023

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
51	Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyesuaian Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD; b. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah; c. Penyesuaian Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD Panembahan Senopati 	BPKPAD, RSUD Panembahan Senopati, Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	<ul style="list-style-type: none"> a. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 b. Perbup Bantul Nomor 55 Tahun 2024

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
52	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul	a. Penyesuaian Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD; b. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; c. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah; d. Penyesuaian Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD Panembahan Senopati	BPKPAD, Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	a. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 b. Perbup Bantul Nomor 55 Tahun 2024
53	Pedoman Pemberian Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma	Ketentuan tentang pengelolaan remunerasi di RSUD Saras Adyatma	Dinas Kesehatan, BPKPAD, Bagian PPSDA Setda Kabupaten Bantul, Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
54	Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul	Ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Saras Adyatma	Dinas Kesehatan, BPKPAD, Bagian PPSDA Setda Kabupaten Bantul, Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	Permendagri Nomor 79 Tahun 2019
55	Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pantai Selatan Bantul	a. Tujuan penataan wilayah perencanaan b. Rencana struktur ruang c. Rencana pola ruang d. ketentuan pemanfaatan ruang e. Peraturan zonasi f. Kelembagaan	DPTR, DPMPTSP, DPUPKP, BPN	Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021
56	Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bantul Timur	a. Tujuan penataan wilayah perencanaan b. Rencana struktur ruang c. Rencana pola ruang d. ketentuan pemanfaatan ruang e. Peraturan zonasi f. Kelembagaan	DPTR, DPMPTSP, DPUPKP, BPN	Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021
57	Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bantul Bantul Barat	a. Tujuan penataan wilayah perencanaan b. Rencana struktur ruang c. Rencana pola ruang d. ketentuan pemanfaatan ruang e. Peraturan zonasi f. Kelembagaan	DPTR, DPMPTSP, DPUPKP, BPN	Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
58	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bantul	Pengendalian pemanfaatan ruang (penilaian KKPR dan pernyataan mandiri UMK, penilaian rencana perwujudan tata ruang, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi, penyelesaian sengketa penataan ruang) dan pengawasan pemanfaatan ruang (pemantauan, evaluasi dan pelaporan)	DPTR, Bappeda, DPUPKP, DPMPTSP, DKPP, Satpol PP	a. UU Nomor 26 Tahun 2007 b. UU Nomor 11 Tahun 2020 c. PP Nomor 21 Tahun 2021 d. Permen ATR BPN Nomor 21 Tahun 2021 e. Perda Nomor 4 Tahun 2021 f. Perda Nomor 9 Tahun 2017
59	Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014	BPKPAD, Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	PP Nomor 27 Tahun 2014
60	Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu (19)	Penyesuaian dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023	DPMK, Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	Perda Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023
61	Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Sistem elektronik pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang mengatur norma, standar dan prosedur	DPMK, Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, Kapanewon, Kalurahan	a. Permendagri Nomor 46 Tahun 2026 b. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 c. Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 d. Perda Nomor 4 Tahun 2022

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
62	Pembagian Alokasi Dana Desa bagi setiap Kalurahan	Besaran ADD masing-masing Kalurahan, tata cara pencairan, tata cara penghitungan	DPMK, Bagian Hukum, BPKPAD	a. UU Nomor 6 Tahun 2014 b. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 c. Perbup Nomor 59 Tahun 2022
63	Pembagian Dana Desa bagi Setiap Kalurahan	Besaran DD masing-masing Kalurahan, tata cara pencairan, tata cara penghitungan	DPMK, Bagian Hukum, BPKPAD, TA P3MD	a. UU Nomor 6 Tahun 2014 b. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 c. Perbup Nomor 59 Tahun 2022
64	Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagian Hasil Pajak Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024	Besaran bagian hasil pajak masing-masing Kalurahan, tata cara pencairan, tata cara penghitungan	DPMK, Bagian Hukum, BPKPAD	a. UU Nomor 6 Tahun 2014 b. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 c. Perbup Nomor 59 Tahun 2022
65	Pembagian Bagian Hasil Retribusi	Besaran bagian hasil retribusi masing-masing kalurahan, tata cara pencairan, tata cara penghitungan	DPMK, BPKPAD, Dinas KUKMPP, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Bagian Hukum	a. UU Nomor 6 Tahun 2014 b. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 c. Perbup Nomor 59 Tahun 2022
66	Pemberian Dana Kompensasi atas Penggunaan Tanah Kas Kalurahan untuk Fasilitas Umum (35)	Besaran dana kompensasi masing-masing kalurahan, tata cara pencairan, tata cara penghitungan	DPMK, BPKPAD, Bagian Hukum	a. UU Nomor 6 Tahun 2014 b. UU Nomor 13 Tahun 2012 c. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 d. Perbup Nomor 59 Tahun 2022
67	Batas Kalurahan Poncosari	Titik koordinat batas Kalurahan, segmen batas Kalurahan, nama Dusun	DPMK, Bagian Hukum	a. UU Nomor 6 Tahun 2014 b. Permendagri Nomor 45 Tahun 2016

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
68	Batas Kalurahan Trimurti	Titik koordinat batas Kalurahan, segmen batas Kalurahan, nama Dusun	DPMK, Bagian Hukum	a. UU Nomor 6 Tahun 2014 b. Permendagri Nomor 45 Tahun 2016
69	Batas Kalurahan Gadingsari	Titik koordinat batas Kalurahan, segmen batas Kalurahan, nama Dusun	DPMK, Bagian Hukum	a. UU Nomor 6 Tahun 2014 b. Permendagri Nomor 45 Tahun 2016
70	Batas Kalurahan Gadingharjo	Titik koordinat batas Kalurahan, segmen batas Kalurahan, nama Dusun	DPMK, Bagian Hukum	a. UU Nomor 6 Tahun 2014 b. Permendagri Nomor 45 Tahun 2016
71	Batas Kalurahan Murtigading	Titik koordinat batas Kalurahan, segmen batas Kalurahan, nama Dusun	DPMK, Bagian Hukum	a. UU Nomor 6 Tahun 2014 b. Permendagri Nomor 45 Tahun 2016
72	Batas Kalurahan Srigading	Titik koordinat batas Kalurahan, segmen batas Kalurahan, nama Dusun	DPMK, Bagian Hukum	a. UU Nomor 6 Tahun 2014 b. Permendagri Nomor 45 Tahun 2016
73	Batas Kalurahan Caturharjo	Titik koordinat batas Kalurahan, segmen batas Kalurahan, nama Dusun	DPMK, Bagian Hukum	a. UU Nomor 6 Tahun 2014 b. Permendagri Nomor 45 Tahun 2016
74	Batas Kalurahan Triharjo	Titik koordinat batas Kalurahan, segmen batas Kalurahan, nama Dusun	DPMK, Bagian Hukum	a. UU Nomor 6 Tahun 2014 b. Permendagri Nomor 45 Tahun 2016

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
75	Batas Kalurahan Gilangharjo	Titik koordinat batas Kalurahan, segmen batas Kalurahan, nama Dusun	DPMK, Bagian Hukum	a. UU Nomor 6 Tahun 2014 b. Permendagri Nomor 45 Tahun 2016
76	Batas Kalurahan Wijirejo	Titik koordinat batas Kalurahan, segmen batas Kalurahan, nama Dusun	DPMK, Bagian Hukum	a. UU Nomor 6 Tahun 2014 b. Permendagri Nomor 45 Tahun 2016
77	Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan	Batasan verifikasi oleh Carik, Kenggotaan TPK, penegasan Tupoksi TPK	DPMK, Bagian Hukum	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
78	Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan	Batasan pembelian langsung, penegasan tupoksi Tim Pengadaan Barang Jasa	DPMK, Bagian Hukum, Bag. PBJ	Perka LKPP No 12 Tahun 2019
79	Tata Cara Pemakaman Lurah dan Pamong	Tata cara pemakaman	DPMK	
80	Pedoman Pembangunan Kalurahan	Penyusunan RPJMKal dan RKPKal	DPMK, Bag. Hukum, dan Bappeda	Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Permendes Nomor 21 Tahun 2020
81	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025	Sinkronisasi kegiatan, kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa, kode rekening	DPMK, Bagian Hukum	a. UU Nomor 6 Tahun 2014 b. Permendagri Nomor 45 Tahun 2016

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
82	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa	Siklus tahunan desa sesuai dengan Permendes Nomor 21 Tahun 2020	DPMK, Bagian Hukum	a. UU Nomor 6 Tahun 2014 b. Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020
83	Kerjasama Kalurahan	Jenis dan prosedur kerjasama kalurahan	DPMK, Bagian Hukum, Bagia Tata Pemerintahan, Inspektorat Daerah	Permendagri Nomor 96 Tahun 2017
84	Pedoman Perencanaan dan Pembangunan Kalurahan	Tata cara penyusunan RPJM Kalurahan. RKP Kalurahan	DPMK, Bappeda, Bagian Hukum, Kapanewon	a. Permendagri 114 Tahun 2014 b. Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020
85	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan	Penyesuaian dengan kebijakan kepala daerah dan reformasi kalurahan	DPMK, Bappeda, BPKPAD, Inspektorat, DPUPKP, DLH, Dikpora, Bagian Hukum	
86	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2023 tentang Dana Insentif Kalurahan	Penyesuaian dengan kebijakan kepala daerah dan reformasi kalurahan	DPMK, Bappeda, BPKPAD, Inspektorat, DPUPKP, DLH, Dikpora, Bagian Hukum	

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
87	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan	Penyesuaian dengan kebijakan kepala daerah dan reformasi kalurahan	DPMK, Bappeda, BPKPAD, Inspektorat, DPUPKP, DLH, Dikpora, Bagian Hukum	
88	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan	Penyesuaian dengan kebijakan kepala daerah dan reformasi kalurahan	DPMK, Bappeda, BPKPAD, Inspektorat, DPUPKP, DLH, DP3APPK, Dikpora, Bagian Hukum	
89	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Penyesuaian dengan kebijakan kepala daerah dan reformasi kalurahan	DPMK, Bappeda, BPKPAD, Inspektorat, DPUPKP, DLH, DP3APPK, Dikpora, Bagian Hukum	
90	Administrasi Pemerintahan Kalurahan	Jenis dan tata cara penyusunan administrasi pemerintahan kalurahan	DPMK, Inspektorat, Bagian Hukum, Kapanewon	
91	Standar Pelayanan Minimal Kalurahan	Norma, standar dan prosedur pelayanan minimal kalurahan	DPMK, Inspektorat, Disdukcapil, DPTR, Bagian Hukum, Kapanewon	

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
92	Pemberian Dana Kompensasi Sebagai Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah Dan Pamong Kalurahan Pada Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan	kompensasi sebagai pengganti tanah plungguh	DPMK, BPKPAD Bag. Hukum	
93	Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029	1. Kajian Risiko Bencana, yang meliputi Kajian Bahaya, Kerentanan, dan Kapasitas, untuk seluruh ancaman bencana di Kabupaten Bantul; 2. Kajian Risiko Bencana sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan perencanaan lainnya di Kabupaten Bantul.	BPBD	a. Perda Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2010 b. Perda Kabupaten Bantul No. 22 Tahun 2015 c. Perda Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2010
94	Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029	1. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul tahun 2025-2029 berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Kab. Bantul Tahun 2025-2029; 2. Rencana Penanggulangan Bencana sebagai landasan dalam perencanaan penanggulangan bencana dan perencanaan lainnya di Kabupaten Bantul.	BPBD, BAPPEDA	a. Perda Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2010 b. Perda Kabupaten Bantul No. 22 Tahun 2015 c. Perda Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2010

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
95	Rencana Kontingensi Tingkat Kabupaten untuk Ancaman Tanah Longsor	Rencana Kontingensi Tingkat Kabupaten untuk Ancaman Tanah Longsor berdasarkan skenario kejadian tanah longsor terburuk di Daerah.	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> a. Perda Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2010 b. Perda Kabupaten Bantul No. 22 Tahun 2015 c. Perda Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2010
96	Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor di Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor di Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri berdasarkan skenario kejadian tanah longsor terburuk di kawasan tersebut.	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> a. Perda Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2010 b. Perda Kabupaten Bantul No. 22 Tahun 2015 c. Perda Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2010

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
97	Pedoman Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana	Pedoman Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana yang memuat antara lain: a. ketentuan umum; b. maksud dan tujuan; c. forum PRB; d. fungsi, tugas dan peranan forum PRB; e. pembentukan; f. bentuk organisasi; g. kegiatan forum PRB; h. pembentukan, organ, dan pengesahan forum PRB Kabupaten, Kapanewon, dan Kalurahan; i. fasilitasi pengembangan dan pembinaan; j. pendanaan; k. ketentuan peralihan; l. ketentuan penutup.	BPBD	a. Perda Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2010 b. Perda Kabupaten Bantul No. 22 Tahun 2015 c. Perda Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2010
98	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 03 B Tahun 2012 tentang Pemberian Santunan kepada Korban Bencana	Perubahan besaran santunan bagi korban bencana	BPBD	a. Perda Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2010 b. Perda Kabupaten Bantul No. 22 Tahun 2015 c. Perda Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2010

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
99	Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	Penyelenggaraan Pendidikan inklusif jenjang Paud, SD, dan SMP	Dikpora, DP3APPKB, Bagian Hukum	Pergub DIY Nomor 77 Tahun 2022
100	Sekolah Ramah Anak	Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak	Dikpora, DP3APPKB, Bagian Hukum	Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022
101	Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru	Pedoman pelaksanaan PPDB untuk jenjang TK, SD, SMP	Dikpora, Bagian Hukum	Keputusan Sekjen Kemenrisbudristek No 47-M-2023
102	Penggunaan Aplikasi untuk pelayanan pendidikan	Pemanfaatan aplikasi untuk layanan Pendidikan di Dinas Dikpora	Dikpora, Diskominfo, Bagian Hukum	a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2021 b. Peraturan Bupati Bantul NOmor 132 Tahun 2020
103	Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah	Petunjuk pengelolaan BOSDA dan mekanisme pelaporan	Dikpora, BPKPAD, Bagian Hukum	Permendagri Nomor 77 Tahun 2022
104	Pedoman Pemberian Insentif kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, Dan Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024	Pedoman Pemberian Insentif	Dikpora, BPKPAD, Bagian Hukum	Perda Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
105	Pencabutan Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah	Pencabutan Peraturan Bupati dikarenakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Dikpora	Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022
106	Perubahan Peraturan Bupati bantul Nomor Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	menambah kelembagaan TK	Dikpora, BKPSDM, BPKPAD, Bag. Organisasi dan Bagian Hukum	
107	Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	Mengatur mengenai pendelegasian penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonberusaha di daerah, tata cara pengenaan sanksi administratif, pengelolaan pengaduan masyarakat, dan pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS.	DPMPTSP, DPUPKP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Bagian Hukum, Bagian PPSDA.	Perda Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
108	Peraturan Bupati Bantul tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029	Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal masing-masing bidang (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas, sosial)	Bappeda, BPKPAD, Inspektorat, Dinas DIKPORA, Dinas Kesehatan, Dinas PUPKP, BPBD, Satpol PP, Dinas Sosial, Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan	Permendagri Nomor 59 Tahun 2021
109	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	a. Identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan; b. Keanggotaan dan tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	Sekretariat Daerah; Inspektorat Daerah; BAPPEDA	Permendagri Nomor 22 Tahun 2020
110	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung: 1. Kebijakan kelengkapan administrasi yang belum tertuang dalam Perda 2. Sinkronisasi dengan peraturan pada OPD lain (DPTR, DLH)	DPUPKP, DPTR, DLH, BPN	Perda Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2022

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
111	Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas 2. Aksesibilitas Kerja 3. Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. 4. Akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas 5. Akomodasi yang layak dalam bantuan hukum 6. Penghargaan dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas 7. Sanksi administratif	Dinsos, Disnakertrans, Dinas Dikpora, Dinas Kesehatan, DKUKMPP, Bagian Kesra, Bagian Hukum	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021
112	Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Pemberdayaan masyarakat melalui perpustakaan daerah	Dispusip, DP3APPKB, Dinsos, Dinas Dikpora, Bagian Kesra	Perda Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015
113	Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Bantul	Optimalisasi Peran-Peran Perangkat Daerah dan Pihak-Pihak Terkait dalam Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Bantul, diantaranya adalah dalam memaksimalkan fungsi Kartu Sehat Ibu dan Anak, Pemanfaatan Aplikasi Sipia, dan Kalurahan Siaga Kesehatan Ibu dan Anak.	Dinkes, DPMK, DP3APPKB, Dinas Dikpora, Bagian Kesra	a. Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 b. Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 c. Perbup Nomor 38 Tahun 2021

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
114	Jaring Pengaman Sosial Bidang Pendidikan	Sasaran, kriteria penerima, besaran, dan mekanisme pemberian Jaring Pengaman Sosial bidang pendidikan	Dikpora, Dinas Sosial, Bagian Kesra, Bagian Hukum	
115	Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bantul	Pengelolaan adangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	DKPP, Bappeda, Inspektorat Daerah	a. UU Nomor 18 Tahun 2022; b. PP Nomor 17 Tahun 2015; c. Perda Nomor 4 Tahun 2018; d. Pergub Nomor 115 Tahun 2018
116	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 28A Tahun 2011 tentang Perizinan di Bidang Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Mengatur terkait perizinan tenaga medik veteriner, tenaga paramedic veteriner (Keswan, Inseminator, PKB, ATR), Pembukaan klinik/rumah sakit hewan	DKPP, DPMPTSP	a. UU nomor 41 Tahun 2014; b. PP Nomor 3 Tahun 2017; c. Permentan Nomor 64 Tahun 2007; d. Permentan Nomor 3 Tahun 2019
117	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Waralaba	DPMPTSP, Bagian Hukum, Bagian PPSDA	Perda Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2008
118	Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Melaksanakan Perda tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, Bagian Hukum, Bagian Kesra	Perda P4GN

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
119	Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	mengatur terkait hak-hal yang didelegasikan dari Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	DMPTSP, DKUKMPP, , Dinas Sosial, Bagian Hukum, Disnakertrans	Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023
120	Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara	Kode etik dan perilaku, berakhlak	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BPKPAD, BKPSDM, Inspektorat Daerah	UU Nomor 20 Tahun 2023
121	Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul	Disiplin PPPK, perkawinan dan perceraian PPPK	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BPKPAD, BKPSDM, Inspektorat Daerah	PP 49 Tahun 2018
122	Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Pengembangan karir PNS	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM	Perka BKN Nomor 28 Tahun 2020
123	Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Instansi	Mekanisme mutasi PNS antar instansi pemerintah	BKPSDM, Bagian Organisasi, BPKPAD, Bagian Hukum	a. Perka BKN Nomor 5 Tahun 2019 b. Permendagri Nomor 58 Tahun 2019
124	Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Kalurahan di Kabupaten Bantul	Persyaratan dan Tata Cara Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kalurahan	Kalurahan	a. UU Nomor 23 Tahun 2006 b. UU Nomor 24 Tahun 2013

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
125	Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Bantul dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampai sejenis sampah rumah tangga serta program kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	DLH, Bagian Hukum, Bappeda, DPUPKP	Perpres Nomor 97 Tahun 2017
126	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan Tahun 2024-2029	rencana strategis UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan dengan penerapan BLUD	DLH, BPKPAD, Bagian PPSDA Setda. Kabupaten Bantul, Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018
127	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan Kabupaten Bantul	SPM UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan dengan penerapan BLUD	DLH, BPKPAD, Bagian PPSDA Setda. Kabupaten Bantul, Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018
128	Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan Kabupaten Bantul	pola tata kelola UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan dengan penerapan BLUD	DLH, BPKPAD, Bagian PPSDA Setda. Kabupaten Bantul, Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
129	Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul	Peran dan tanggung jawab Perangkat Daerah dalam SAKIP	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Perpres Nomor 29 Tahun 2014
130	Formasi, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ASN Kabupaten Bantul	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Permenpan Nomor 1 Tahun 2020
131	Hasil Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan	Hasil Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan Kabupaten Bantul	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Permenpan Nomor 34 Tahun 2011
132	Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul	Pemberian TPP sesuai kinerja dan kelas jabatan	Bag. Organisasi, BKPSDM, BPKPAD	
133	Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	Pemberian TPP kepada P3K sesuai kemampuan keuangan daerah	Bag. Organisasi, BKPSDM, BPKPAD	
134	Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga	a. kenaikan tarif retribusi seluruh kawasan;b. penggabungan dua kawasan pantai;c. Pemberlakuan kenaikan tarif per 1 April 2024	Dinas Pariwisata	Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
135	Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah kabupaten Bantul	a. Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul; b. Tugas dan Fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul; c. Biaya Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul;	Dinas Pariwisata	a. UU Nomor 10 Tahun 2009 b. Perda Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 c. Perda Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020
136	Petunjuk Teknis Penegakan Peraturan Daerah	Tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja	Satpol PP	Permendagri Nomor 54 Tahun 2021
137	Pengelolaan Arsip Elektronik	Penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan arsip, penyusutan arsip dan alih media (aktif dan inaktif)	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Perda Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019
138	Jadwal Retensi Arsip Kabupaten Bantul	Pemindahan arsip, pemusnahan arsip, dan penyerahan arsip statis	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Perda Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019
139	Program Kampung Iklim di Kabupaten Bantul	Mengatur mengenai Tata Laksana Program Kampung Iklim, Perencanaan dan Pelaksanaan, Pembinaan dan Fasilitasi, Apresiasi Program Kampung Iklim, Kerja sama dan Kemitraan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan	DLH	-

BUPATI BANTUL,

ttd